



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TIMUR  
**SUB UNIT KERJA** : -

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SAHRUDIN
2. Jabatan : HAKIM / KETUA - PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
3. NHK : 15602

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 5.160.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 259 m2/200 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 13950 m2 di INDRAMAYU, WARISAN Rp. 498.000.000
3. Tanah Seluas 7070 m2 di INDRAMAYU, WARISAN Rp. 353.500.000
4. Tanah Seluas 1007 m2 di INDRAMAYU, WARISAN Rp. 213.000.000
5. Tanah Seluas 4578 m2 di INDRAMAYU, WARISAN Rp. 981.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1358 m2/400 m2 di INDRAMAYU, WARISAN Rp. 1.540.000.000
7. Tanah Seluas 800 m2 di LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 400 m2 di LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 133.500.000**

1. MOBIL, MAZDA 2 SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BYSON SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	43.803.227
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.337.803.227
III. HUTANG	Rp.	358.255.780
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.979.547.447

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.